

PENELITIAN DISERTASI

***BUREUCRAT-INTELLECTUAL NETWORK* DALAM
INTERAKSI TRANSNASIONAL DI KABUPATEN BANYUMAS**

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat pendidikan Strata 3 (S3)



Diusulkan Oleh
Tundjung Linggarwati
15/389899/SP/00316

PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1597/FSP.2/DPP-S3/AKD.25/XII/2022

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Tundjung Linggarwati
NIM : 15/389899-SSP/00316
Program Studi : Doktor Ilmu Politik
Departemen : Politik dan Pemerintahan
Judul Disertasi : "BUREAUCRATIC INTELLECTUAL NETWORK DALAM INTERAKSI TRANSNASIONAL DI KABUPATEN BANYUMAS)"
Tanggal Ujian : 27 Juli 2022
Tim promotor : Promotor : Prof. Dr. Mohtar Mas'ood
Ko-promotor : Dr. Maharani Hapsari
Penguji : Dr. Abdul Gaffar Karim
Dr. Riza Noer Arfani
Dr. Nur Azizah
Dr. Dody Wibowo
Dr. Ririn Tri Nurhayati

Telah mendapatkan persetujuan dari Tim Promotor dan Penguji sehingga dinyatakan telah menyelesaikan revisi final pada tanggal 23 Desember 2022.
Surat Keterangan ini dibuat dan berlaku pada masa tanggap darurat covid-19 dan dapat dipergunakan sebagai lembar pengesahan dan persetujuan karya tulis akhir sebagai syarat yudisium atau wisuda pada Program Studi Doktor Ilmu Politik.
Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Dekan
Ketua Program Studi,

Dr. Analinda Savirani
NIP. 197401282002122002

RINGKASAN
PENELITIAN DISERTASI
***BUREAUCRAT-INTELLECTUAL NETWORK* DALAM**
INTERAKSI TRANSNASIONAL DI KABUPATEN BANYUMAS

Diajukan untuk mendapatkan gelar pascasarjana Strata-3 (S3)



Diusulkan Oleh
Tundjung Linggarwati
15/389899/SP/00316

PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang interaksi transnasional yang terjadi di Kabupaten Banyumas, peran pemerintah Kabupaten Banyumas serta melihat relasi aktor yang mendorong terjadinya interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi transnasional serta data sekunder berupa literatur, artikel jurnal, dokumen dan data-data lain yang relevan. Penelitian ini menghasilkan identifikasi tentang interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas yang terjadi pada beberapa bidang antara lain bidang ekonomi, pembangunan pedesaan, budaya dan pendidikan. Peran pemerintah dalam interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas adalah dalam hal regulasi, fasilitasi dan eksekusi. Pemerintah Kabupaten Banyumas membuat regulasi yang tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Banyumas. Regulasi ini juga terkait dengan prosedur dalam mengurus legalitas dan hal-hal yang berkaitan dengan layanan.

Fasilitasi berupa layanan konsultasi maupun pendampingan, pelatihan serta pemberian bantuan alat serta memfasilitasi adanya asosiasi sehingga lebih mudah dalam melakukan koordinasi. Dalam perannya sebagai eksekutor, pemerintah bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Dalam interaksi transnasional yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi relasi antara aktor di tingkat lokal yaitu intelektual yang merupakan pembawa atau penyebar ide atau gagasan tentang interaksi transnasional, birokrat sebagai pemberi fasilitas pada aktivitas transnasional terkait dengan kewenangannya sebagai birokrat. Sedangkan entrepreneur merupakan kalangan pegiat atau pelaku interaksi transnasional yang secara aktif menjalin interaksi transnasional secara berkelanjutan dalam bidang tertentu.

Relasi antar aktor di ranah politik lokal terkait interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas adalah relasi jaringan intelektual birokrat (*bureaucratic intellectual network*) dimana kedua kelompok ini memiliki kepentingan dan peran serta sumberdaya yang signifikan dalam mendorong terjadinya kejasama dalam interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci : Banyumas, jaringan intelektual birokrat,interaksi transnasional,

Abstract

This study aims to find out transnational interaction in Banyumas Regency, the role of the Banyumas Regency government and the relations among local actors that encourage transnational interactions in Banyumas Regency. The study uses descriptive qualitative research method with primary data source from interviews with parties involved in transnational interactions and secondary data from literature, scientific article, documents and other relevant data.

This research identifies transnational interaction that occurred in several fields including economy, rural development, culture and education. The government's role in transnational interaction in Banyumas regency is in terms of regulation, facilitation and execution. The Banyumas Regency government makes regulations that non-contradictory with central government regulation relating to the duties and authorities of existing agencies in Banyumas Regency. This regulation consist of procedures in managing legality and matters relating services. Facilitation is consulting and monitoring services, training as well as providing assistance with tools and facilitating the existance of association to make easier to coordinate. In its role as executor, the government acts as a policy implementer.

Transnational interaction in Banyumas Regency shows the relationship between local actors, namely intellectual bureaucrat and entrepreneurs. Intellectual actors who bring or spread ideas about transnational interactions, while bureucrats provide facilitattion for transnational activities related to their authority as bureucrats. Meanwhile , entrepreneurs are activist or transnational actors who actively establish transnational interaction in a sustainable manner in certain field. The relationship between actors in the local political sphere related to transnational interactions in Banyumas Regency is the bureaucratic intellectual network. Bureaucrat dan intellectual have significant interest and roles and resources in encouraging cooperation in transnational interaction in Banyumas Regency.

Keywords : Banyumas, bureaucratic intellectual network, transnational interaction

DAFTAR ISI

Halaman sampul	1
Abstrak	2
Daftar isi	3
Pendahuluan	4
Metode Penelitian	5
Hasil dan Pembahasan	7
Kesimpulan	18
Daftar Pustaka	21

Pendahuluan

Interaksi transnasional telah menjangkau berbagai negara termasuk Indonesia dan kemudahan akses informasi serta transportasi membuat masyarakat banyak yang terlibat dalam interaksi transnasional tersebut. Demikian juga masyarakat Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 memiliki luas wilayah 1.327,59 km persegi yang memiliki 27 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.665.025. Wilayah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai 70,75 di tahun 2017 serta tingkat harapan hidup yang mencapai 73,33 di tahun 2017 ini memiliki berbagai aktivitas transnasional dalam berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, olah raga, serta pariwisata.

Di bidang ketenagakerjaan, Kabupaten Banyumas sudah sudah mengirimkan tenaga kerja untuk dipekerjakan di berbagai negara. Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja asal Kabupaten Banyumas yang dikirimkan ke luar negeri. Pada awalnya pengiriman tenaga kerja lebih banyak ke negara Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Hongkong dan Taiwan

Di sektor perekonomian, nilai ekspor tertinggi di Kabupaten Banyumas ditempati oleh komoditas minyak atsiri, kayu olahan dan gula kelapa. Jenis komoditas kayu olahan yang di ekspor oleh para pengusaha perkayuan di Kabupaten Banyumas lebih banyak produk kayu untuk kepentingan pengepakan. Di sektor industri gula Kristal, para pengusaha di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2010 telah mengeksport produknya ke berbagai negara antara lain

Jepang, Kanada, Amerika, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Jerman, Hungaria, Finlandia, Korea, Taiwan, Singapura, Australia, Selandia Baru, India, Afrika Selatan dan berbagai negara lain

Di bidang pendidikan, beberapa pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Banyumas sudah terkoneksi dengan pihak luar negeri melalui berbagai program sekolah, program nasional maupun atas kehendak dan fasilitasi pribadi. Di kalangan pelajar keikutsertaan pelajar di Kabupaten Banyumas di forum internasional tercatat pada bidang olimpiade sains, pertukaran pelajar antar negara serta berbagai program dari kementerian pemuda dan olahraga. Demikian pula dibidang pembangunan pedesaan yang sudah memanfaatkan kerjasamanya dengan pihak asing.

Memperhatikan adanya interaksi transnasional yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas, tidak bisa diabaikan terkait peran-peran aktor yang terlibat di dalamnya. Aktor-aktor di tingkat lokal memiliki peran yang beragam dalam interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas yang terkait dengan munculnya gagasan untuk melakukan aktivitas transnasional, kebijakan-kebijakan serta berbagai kepentingan yang muncul dalam interaksi transnasional ini. Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini adalah mengemukakan adanya aktor selain pemerintah dan masyarakat dalam interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas yaitu intelektual yang menjalankan fungsi-fungsi konstruksi tentang transnasionalisme melalui aktivitasnya sebagai kaum akademisi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mempelajari segala sesuatu di lingkungannya yang alami, mencoba untuk memahami atau menafsirkan fenomena menurut makna-makna yang diberikan kepada fenomena tersebut oleh orang-orang. Seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif meliputi penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris yang diteliti penelitian kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah kehidupan, wawancara, pengamatan, sejarah, interaksi, dan naskah-naskah visual yang menggambarkan momen-momen problematik dan kehidupan sehari-hari serta makna yang ada di dalam kehidupan individu. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konstruktivis dalam melihat

fenomena transnasionalisme di Kabupaten Banyumas dimana pendekatan ini menekankan pada pengetahuan dalam konstruksi sosial yang berkaitan dengan cara mendefinisikan situasi (dalam hal ini transnasionalisme) sehingga menentukan sikap dan tindakan tertentu pada pelaku.

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian adalah para pelaku interaksi transnasional yang terkategori dalam beberapa bidang yang disusun berkaitan dengan motivasi atas keterlibatannya dalam interaksi transnasional. Bidang-bidang tersebut adalah bidang ekonomi (perdagangan dan investasi), pembangunan pedesaan (kerjasama dengan pihak luar negeri untuk pembangunan pedesaan), budaya (terkait aktivitas seni dan budaya) serta pendidikan.

Wawancara akan dilakukan per bidang dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan bagi informan tiap-tiap bidang maupun unit-unitnya serta daftar informannya agar wawancara bisa dilakukan secara terstruktur, sistematis dan memenuhi target baik data yang didapatkan maupun jangka waktunya. Daftar pertanyaan yang disusun akan mengacu pada teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sehingga data yang diperoleh lebih mudah dianalisa. *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan makna menurut pemahaman sebuah kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada permasalahan tertentu. Dalam FGD akan dilakukan verifikasi terhadap hasil wawancara dan berfungsi juga melengkapi data yang belum terdapat saat wawancara. FGD akan dilakukan pada tiap bidang yang diteliti. pengumpulan data pustaka, dokumen dan lain-lain seperti dokumen-dokumen tentang kebijakan, peraturan, laporan-laporan maupun data statistik yang sudah tersedia sebagai pendukung. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan terlebih dahulu akan diperiksa dan dipilah agar memudahkan peneliti dalam memeriksa kejelasan maupun kelengkapannya, selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data yang didapatkan dan dilanjutkan dengan melakukan tabulasi data. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan analisis pada 4 bidang transnasional yang terdapat di Kabupaten Banyumas. Keempat bidang tersebut berdasarkan data-data yang didapat oleh peneliti yang kemudian diklasifikasikan dalam ke empat bidang yaitu transnasionalisme di bidang ekonomi, pembangunan pedesaan, budaya dan pendidikan. Keempat bidang ini dinilai menjadi bidang-bidang penting yang merepresentasikan adanya aktivitas transnasional di Kabupaten Banyumas.

Tahap selanjutnya peneliti melakukan interpretasi pada data sebelum menyajikan dalam bentuk narasi dan melakukan analisis berdasarkan pendekatan yang digunakan. Dalam

melakukan analisis penulis memilah menjadi dua aktivitas, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan proses konstruksi sosial serta aktivitas yang berkaitan dengan peran aktor yang dalam hal ini lebih menekankan pada peran birokrat dan intelektual dengan relasi yang terbentuk antar keduanya. Pola relasi yang terbentuk antar aktor tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori jaringan aktor (ANT) untuk memetakan peran masing masing aktor dalam jaringan. Analisis terkait type-type transnasional yang terjadi di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan memetakan keempat bidang transnasionalisme yang ada di Kabupaten Banyumas melalui identifikasi karakteristiknya dan dilakukan analisis untuk menetapkan type atau model transnasionalisme nya menurut Erdal dan Oeppen.

Dalam penelitian ini peneliti mempertimbangkan interaksi transnasional dengan melihat keterlibatan aktor non negara, intensitas interaksi baik dari jumlah aktor maupun frekuensi interaksi tersebut serta durasi maupun keberlanjutan interaksi tersebut. Demikian pula untuk melihat peran atau upaya pemerintah dan akademisi, peneliti melakukan klasifikasi data berdasarkan kewenangan OPD dalam bidangnya yang terkait dengan interaksi transnasional, aktivitas OPD baik secara kebijakan maupun tindakan teknis dalam mendukung aktivitas transnasional di Kabupaten Banyumas. Sedangkan peran akademisi ditunjukkan melalui data-data terkait aktivitas para akademisi dalam melakukan aktivitas transnasional maupun melakukan proses konstruksi sosial melalui berbagai kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

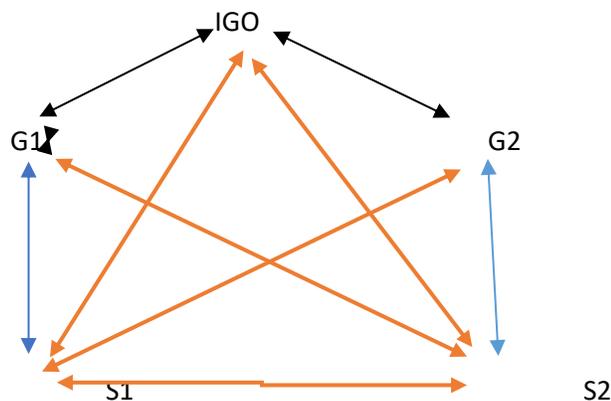
Transnasional digambarkan oleh Nye dan Keohane sebagai kontrak, koalisi dan interaksi lintas batas negara yang tidak secara langsung dikendalikan oleh kebijakan pusat pemerintahan (Nye dan Keohane, 1971). Dalam interaksi ini terjadi efek timbal balik (reciprocal) antara hubungan transnasional dan system antar negara sebagai hal yang sangat penting dalam pemahaman hubungan internasional kontemporer. Interaksi global merupakan aktivitas yang memindahkan informasi, uang, benda fisik, orang, benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud lainnya yang melintasi batas negara. Dengan demikian ada empat jenis utama interaksi global: *pertama*, komunikasi (*communication*) dalam hal ini ada pergerakan informasi, adanya transmisi tentang keyakinan, ide dan doktrin, *kedua*, transportasi (*transportation*) yaitu pergerakan benda secara fisik baik barang pribadi, maupun komoditas perdagangan, *ketiga*, keuangan (*finance*), yaitu pergerakan uang dan instrumen kredit, *keempat*,

perjalanan (*travel*), yaitu pergerakan manusia lintas negara. Berbagai aktivitas internasional melibatkan keempat interaksi tersebut secara bersamaan.

Interaksi global yang diprakarsai dan seluruhnya oleh pemerintah seperti perang, perdagangan skala besar, dan beberapa hal yang berkaitan dengan keuangan yang merupakan interaksi antar negara dalam kerangka aktivitas diplomasi konvensional. Sedangkan interaksi – interaksi lain yang melibatkan aktor non pemerintah baik itu individu atau organisasi yang dianggap sebagai interaksi transnasional. Dengan demikian interaksi transnasional adalah istilah yang digunakan oleh Nye dan Keohane untuk mendeskripsikan adanya pergerakan benda (*tangible and intangible*) yang melintasi batas negara dimana setidaknya salah satu pelakunya bukan merupakan agen pemerintah maupun organisasi pemerintah. Lebih jauh Nye dan Keohane menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan organisasi internasional, pelaku hubungan transnasional mewakili organisasi non pemerintah atau merupakan agen pemerintah.

Interaksi transnasional bisa dilihat dari membedakannya dengan interaksi antar negara dimana pusat interaksi adalah pemerintah negara yang berinteraksi dengan masyarakatnya atau dengan pemerintah negara lain dalam bentuk organisasi antar pemerintah (IGO). Artinya, interaksi yang terbentuk hanya berupa *interstate politics* dan *domestic politics*. Sedangkan dalam interaksi transnasional berbeda dengan interstate maupun domestic politics dimana interaksi transnasional memungkinkan terkoneksi masyarakat disebuah negara dengan masyarakat atau pemerintahan di negara lain, bahkan pada organisasi antar pemerintah yang ada. Nye dan Keohane menggambarkan interaksi transnasional dan interstate sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 1. Interaksi Transnasional dan Interstate Politics



Keterangan:



	Interstate politics
	Domestic politics
	Transnational interactions
G	Government
S	Society
I	Intergovernmental Organization

Sumber: Nye dan Keohane (1971:334)

Transnasionalisme menurut Rosenau (1980) adalah proses dimana hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, swasta yang dapat memiliki konsekuensi penting bagi berlangsungnya berbagai peristiwa. Rosenau mengamati bahwa keterlibatan individu, maupun kelompok non pemerintah ini sebagai aktor transnasional yang mampu melakukan interaksi dalam berbagai kepentingan baik ekonomi maupun sosial budaya.

Menurut Kaupi dan Viotti (1987), kalimat *The rise of nations states and cross border transaction* menunjukkan bahwa implikasi dari globalisasi adalah hubungan antar negara di dunia menjadi seakan tidak ada sekat yang menyebabkan interaksi yang melintasi batas negara semakin mudah dan melibatkan semakin banyak aktor non negara dan membentuk hubungan transnasional dan semakin menurunnya peran negara sebagai satu satunya aktor hubungan internasional. Munculnya aktor-aktor transnasional semakin membuat pola hubungan internasional menjadi bergeser menjadi tidak selamanya interstate lagi. Peter Willets (2004) mengidentifikasi bentuk-bentuk aktor transnasionalisme yaitu pertama Non-Governmental Organizations (NGOs) dan International Non-Governmental Organizations(INGOs), kedua, International Governmental Organizations (IGOs) yang merupakan bentuk organisasi yang beranggotakan perwakilan negara, bergerak atas inisiatif negara, memiliki berbagai kesepakatan dan perjanjian yang mengikat, serta keputusannya bisa berkekuatan memaksa negara anggotanya bahkan bisa mempengaruhi NGOs maupun INGOs. Contoh IGOs adalah United Nations (PBB), *World Trade Organization* (WTO), Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) dll. Ketiga, Multinational Corporations (MNCs) yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara namun pembuatan keputusan terpusat pada negara induknya. Contoh MNC adalah Sony dan Google. Sementara itu aktivitas keagamaan global (Nye dan Keohane, 1971), aktivitas para profesional di bidangnya, tenaga kerja, pertukaran pelajar serta aktivitas individu lainnya yang melintasi batas negara merupakan interaksi transnasional.

Bahkan saat ini tanpa seseorang bepergian atau berpindah ke luar negeri sudah bisa terkoneksi secara transnasional melalui pemanfaatan teknologi informasi.

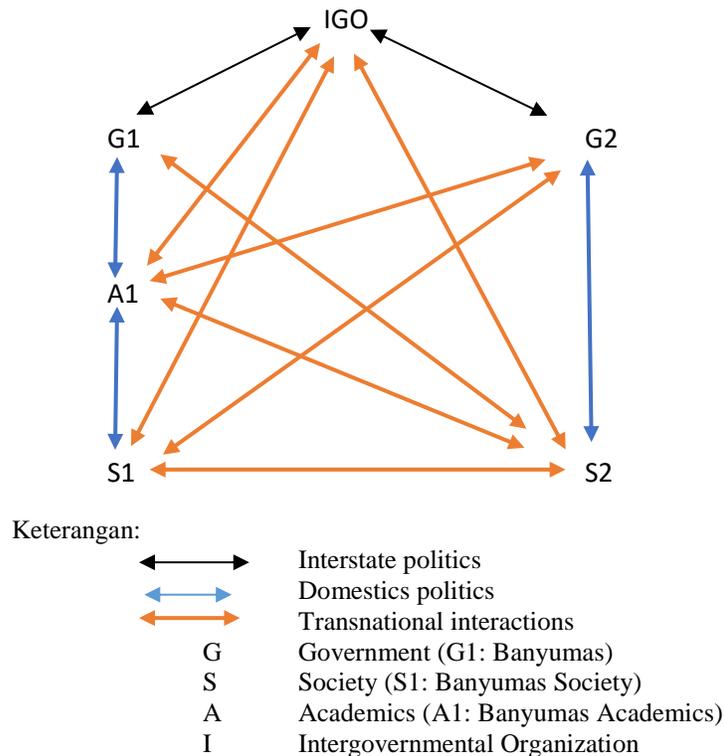
Dalam interaksi yang terjadi antara ketiga jenis aktor tersebut yang dalam hal ini intelektual, birokrat maupun entrepreneur tidak lepas dari kepentingan masing-masing kelompok aktor tersebut. Dalam setiap ranah interaksi transnasional yang dibahas dalam penelitian para akademisi yang memiliki peran sebagai pembawa gagasan, ide-ide transnasional melalui berbagai aktivitas Tridharma yang menjadi kewajiban para akademisi (dosen), baik pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Di satu sisi para akademisi berperan mengkonstruksi masyarakat termasuk pemerintah dengan gagasan interaksi transnasional di berbagai bidang. Ide-ide tentang pentingnya interaksi transnasional, peluang-peluang yang bisa didapatkan melalui interaksi transnasional, hingga merancang berbagai strategi melalui analisis ilmiahnya atas potensi yang ada dalam masyarakat agar bisa dikembangkan melalui interaksi transnasional yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Para akademisi juga mampu menjembatani ranah ide, atau gagasan yang awalnya dikonstruksikan melalui berbagai media baik publikasi, sosialisasi maupun berbagai aktivitas lainnya menjadi rumusan kebijakan pemerintah melalui penyampaian gagasan dan ide-ide melalui berbagai forum diskusi, konsultasi, workshop, seminar maupun adanya berbagai naskah akademik yang dibuat oleh para akademisi sebagai rujukan bagi pembuatan kebijakan maupun aturan di lembaga pemerintahan mulai dari tingkatan yang paling rendah, dalam hal ini desa yang mendapatkan pendampingan dalam menyusun peraturan maupun pendampingan dalam pengembangan potensinya hingga pemerintah kabupaten yang memanfaatkan kerjasama dengan para akademisi dalam membuat kebijakan, mengimplementasikan maupun mengevaluasi kebijakan.

Jika kita merujuk pada teori transnasionalisme yang disampaikan oleh Keohane dan Nye (1971) dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka terlihat interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas tidak hanya melibatkan kelompok masyarakat dan pemerintah namun juga melibatkan peran penting para akademisi di dalamnya tidak hanya sebagai pembawa gagasan bagi masyarakat namun juga aktif menjalani interaksi transnasional itu sendiri. Jika dilakukan pemetaan dengan berbekal skema yang disampaikan oleh Keohane dan Nye (1971) yang selama ini dijadikan kerangka bagi pemetaan aktor transnasional yang terlibat maka khusus untuk Kabupaten

Banyumas maka skema interaksi aktornya mengalami perubahan mengingat ada aktor akademisi (kelompok intelektual) yang memiliki peran penting di dalamnya

Gambar 4. 1 Interaksi Transnasional di Kabupaten Banyumas



Skema interaksi transnasional di atas awalnya dibuat oleh Keohane dan Nye (1971), namun dalam prakteknya yang terjadi di Kabupaten Banyumas menempatkan aktor intelektual yaitu akademisi dalam ranah *interstate politic* yang dalam hal ini adalah dinamika politik Kabupaten Banyumas dalam menjalani interaksi transnasional, sehingga gambar tersebut lebih melihat pada satu sisi saja yaitu Kabupaten Banyumas dengan aktor lokal yang merupakan pemerintah lokal, akademisi serta masyarakat lokal Banyumas (G1,A1,S1), karena peneliti tidak lebih luas meneliti dari sisi aktor yang berlawanan yaitu negara dan masyarakat di luar negeri (G2, S2) yang dimungkinkan memiliki karakter yang sama atau bisa pula berbeda dari yang ada dalam gambar awal yang dibuat oleh Keohane dan Nye.

Peran akademisi yang begitu besar dalam interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas tidak lepas dari kepentingan para akademisi tersebut baik secara individu maupun secara institusional. Secara institusional aturan tentang internasionalisasi perguruan tinggi, pembentukan

kantor urusan internasional hingga pemeringkatan perguruan tinggi yang mempertimbangkan banyaknya aspek internasionalisasi perguruan tinggi antara lain publikasi internasional, kerjasama internasional serta aktivitas akademik lainnya di level internasional. Perguruan tinggi banyak melakukan upaya internasionalisasi didasarkan pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga dari negara lain (perguruan tinggi asing) yang melibatkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Swasta (PTS) dalam negeri. Pasal 50 UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa kerja sama internasional pendidikan tinggi adalah proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keIndonesiaan. Sementara itu Permendikbud nomor 14 tahun 2014 mengatur tentang kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. (pasal 2). Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain , dunia usaha, atau pihak lain , baik dalam negeri maupun luar negeri. (pasal 4).

Dalam upaya mendapatkan peringkat yang baik dari lembaga pemerintah (Ditjen Dikti Kemendikbud Ristek) maupun lembaga-lembaga yang melakukan pemeringkatan skala internasional seperti Times Higher Education (THE) yang melakukan pemeringkatan skala internasional secara berkala dengan berdasarkan tiga bidang kegiatan universitas yaitu pengajaran, penelitian, pandangan internasional terhadap dosen, mahasiswa dan staf serta transfer pengetahuan dan teknologi. (sindonews, 2021), dan masih ada beberapa lembaga pemeringkatan lainnya yang mensyaratkan adanya aktivitas berskala internasional dalam penilaiannya. Demikian juga dengan akreditasi internasional perguruan tinggi yang diajukan oleh berbagai program studi kepada berbagai lembaga akreditasi internasional. Akreditasi internasional dianggap penting sebagai jaminan kualitas perguruan tinggi di mata publik internasional. Salah satu manfaat akreditasi internasional itu untuk *recognition* (pengenalan), sehingga perguruan tinggi akan dikenal oleh perguruan tinggi luar negeri dan perolehan akreditasi internasional akan mampu menjembatani lulusan dengan pasar kerja, jaminan status akreditasi internasional akan menjadi pertimbangan di pasar kerja. Setidaknya ada tiga dimensi yang terkait dengan akreditasi internasional yaitu standardisasi *outcomes* yang berkaitan dengan keunggulan proses pembelajaran; sistem dan mekanisme penjaminan mutu prodi dan rekognisi internasional yang

dapat digunakan untuk branding prodi. Saat ini di era global, standardisasi outcomes (kemampuan lulusan) jadi penting agar lulusan dapat bersaing dengan lulusan prodi sejenis dari negara lain, baik untuk pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri mengingat perguruan tinggi menetapkan standar yang sama untuk bidang-bidang yang diajukan dalam akreditasi internasional. Data tahun 2019 menunjukkan ada 396 program studi di Indonesia yang rekognisi internasional yang artinya hanya 10,5% dari 3.762 program studi yang terakreditasi A secara nasional (BAN-PT). Dari 396 program studi tersebut 61% terakreditasi internasional sedangkan 39% merupakan hasil dari penilaian (assessment) *ASEAN University Network-Quality Assurance* atau AUN-QA(Ariffin,2019). Beberapa jenis dan lembaga akreditasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia antara lain *European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)*, *Asia Pacific Quality Register (APQR)* dan *Council for Higher Education Accreditation (CHEA)* untuk bidang umum, *United States Department of Education (USDE)* dan *World Federation of Medical Education (WFME)* untuk bidang kesehatan, *Washington Accord*, *Sydney Accord* dan *Dublin Accord* untuk bidang teknik, *Seoul Accord* untuk ilmu komputer, *Canberra Accord* untuk bidang arsitektur.(Sevima,2021) Masing-masing jenis akreditasi dalam pelaksanaan penelitiannya dilakukan oleh beberapa lembaga yang mendapatkan lisensi untuk dapat melakukannya.

Secara individual, para akademisi/dosen memiliki kewajiban melakukan Tridharma perguruan tinggi. Kewajiban tersebut bukan hanya kewajiban semata tapi berimplikasi pada penilaian kinerja yang berujung pada peningkatan karier dan berimplikasi pada pemberian berbagai tunjangan baik tunjangan fungsional maupun tunjangan kinerja. Jenjang karir tertentu juga menentukan berbagai kesempatan atau peluang yang bisa diambil atau dijalani oleh para dosen, artinya tidak semua dosen mendapatkan kesempatan yang sama mengingat beberapa peluang mensyaratkan jabatan fungsional tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Tidak hanya berkaitan dengan angka kredit yang harus dikumpulkan, namun penilaian beban kerja dosen (BKD) yang dilakukan persemester juga mensyaratkan terpenuhinya Tridharma dalam prosentase tertentu dan pemberian nilai juga mempertimbangkan level aktivitas tersebut (local, nasional, internasional) yang artinya aktivitas di level internasional akan mendapatkan nilai yang tertinggi. Ketentuan ini berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen (PO 2019) yang merupakan penyempurnaan dari aturan-aturan sebelumnya. (PO 2013) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Atas dasar kepentingan yang terkait dengan jenjang karir tersebut para akademisi secara proaktif melakukan aktivitas yang dapat mendorong peningkatan karirnya termasuk aktif menjalin interaksi transnasional dalam bentuk studi lanjut, konferensi internasional, publikasi internasional maupun bermitra dengan peneliti dari luar negeri serta aktivitas lainnya. Disisi lain para akademisi juga melakukan aktivitas riset yang hasilnya selain dipublikasikan secara nasional maupun internasional juga hasil riset sering digunakan sebagai rekomendasi kebijakan, melakukan rekayasa sosial melalui gagasan serta melakukan pendampingan bagi masyarakat agar memanfaatkan interaksi transnasional sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Dengan melihat kepentingan institusional maupun individual dari kelompok akademisi yang sangat kuat berimplikasi pada besarnya peran aktif para akademisi dalam membangun gagasan serta menjadi pelaku atau pegiat aktif (entrepreneur) dalam interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas tidak hanya di ranah pendidikan tapi di sektor kehidupan masyarakat lainnya seperti ekonomi, budaya maupun pembangunan pedesaan. Para akademisi selain menjalankan kewajiban yang digariskan melalui peraturan pemerintah terkait penilaian kinerja, juga sekaligus berperan aktif dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kerjasama tersebut terlihat dalam berbagai aktivitas seperti penelitian yang hasilnya digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu pertimbangan pembuatan kebijakan, pembuatan naskah akademik sebagai rekomendasi kebijakan, penunjukan para akademisi sebagai ahli atau konsultan pemerintah dalam bidang tertentu, asesor, pendamping berbagai program yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dijalankan di daerah serta menjadi tim ahli dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah. Pemerintah pun memberikan kemudahan bagi para akademisi dalam melakukan aktivitasnya terkait peningkatan karir dari mulai perizinan untuk melakukan riset, kesediaan pemerintah sebagai narasumber serta mendukung aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi.

Terkait dengan interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas, pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kepentingan yang besar juga, salah satunya dalam bidang ekonomi dimana jika masyarakat mampu memanfaatkan interaksi transnasional, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan serta

pengentasan kemiskinan. Namun banyak faktor yang harus dipenuhi untuk masyarakat dapat mengakses peluang tersebut, disinilah pemerintah harus bekerjasama dengan para akademisi untuk melakukan aktivitasnya membawa ide, gagasan tentang peluang dan mekanisme serta keuntungan jika masyarakat dapat melakukan interaksi transnasional. Pemerintah juga memerlukan bantuan para akademisi untuk melakukan sosialisasi peraturan dan program pengembangan UKM, peningkatan kualitas produk, sertifikasi produk hingga jejaring yang bermanfaat bagi interaksi transnasional. Target peningkatan ekspor produk lokal selalu diupayakan agar tercapai membuat pemerintah harus menjalankan berbagai program, memberikan berbagai subsidi, pelatihan serta penguatan jejaring dan aktif memfasilitasi keikutsertaan UKM dalam berbagai pameran atau ekspose ataupun *business matching*.

Dalam bidang budaya, berbagai publikasi yang dihasilkan oleh para akademisi menjadi referensi dan menjadi media pengenalan budaya lokal Banyumas di luar negeri, selain peran para pelaku budaya sendiri yang berinisiatif mengembangkan budaya dengan memanfaatkan interaksi transnasional. Pemerintah juga bekerjasama dengan para akademisi dalam pembinaan budaya lokal agar dapat dikenal lebih luas lagi. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memiliki program penguatan ketahanan budaya yang diakibatkan oleh gelombang budaya luar melalui interaksi transnasional yang dapat diakses secara virtual dan mengancam ketahanan budaya lokal.

Secara umum dalam pembangunan di Kabupaten Banyumas yang terkait interaksi transnasional selalu melibatkan kepentingan dan peran pemerintah sebagai birokrat maupun kelompok akademisi sebagai intelektual. Kepentingan keduanya menjadikan berbagai sektor kehidupan masyarakat di Kabupaten Banyumas sebagai sasaran atau obyek bagi pemenuhan kepentingannya sekalipun dengan aktivitas yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi kelompok maupun masyarakat. Relasi intelektual birokrat lebih membentuk jaringan (*Bureaucratic Intellectual Network*) dimana interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas merupakan aktivitas dari kelompok intelektual dan kelompok birokrat dalam sebuah jaringan aktor. Kedua aktor ini memiliki tujuan, kepentingan dan target-target tertentu serta memiliki sumber daya (*resources*) yang memungkinkan antar keduanya terjalin relasi khusus serta sebagai akibat dari tuntutan profesi maupun kewajiban menjalankan peraturan atau program yang berkaitan dengan penilaian kinerja keduanya. Relasi yang terjalin dalam jaringan dapat memberikan manfaat kepada para aktor.

Dalam jaringan aktor yang terlibat dalam interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa masing-masing aktor dalam interaksinya menerima manfaat secara timbal

balik, melakukan interaksi secara berkelanjutan dan mengarah pada interaksi yang bersifat kerjasama. Dalam jaringan tersebut juga terjadi proses konstruksi yang berkaitan aktivitas transnasional. Jika mengacu pada pendapat Onuf yang meyakini bahwa pengetahuan merupakan konstruksi sosial karena pengamat tidak berada pada posisi netral mengingat ide dan peristiwa bukanlah sebuah fenomena independen maka pengetahuan juga ada dalam relasi dalam konteks tertentu, maka hubungan internasional pun merupakan hasil konstruksi manusia yang dengan tindakan maupun ucapannya mampu melakukan konstruksi sosial. Dalam hal ini aturan-aturan yang ada akan menjadi tuntunan bagi tindakan manusia yang memungkinkan adanya pemahaman dan tindakan bersama. Dalam hal ini konsep *deeds* atau tindakan yang berupa ucapan akan mampu melakukan konstruksi sosial. *Speech acts* merupakan kinerja sosial yang memiliki konsekuensi sosial secara langsung. Aturan yang selalu berupa pernyataan bukan berasal dari bahasa yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan sosial dan mencapai tujuan melalui pernyataan tegas maupun perintah tapi melalui *speech acts* (Onuf, 1989; 79).

Sedangkan *speech acts* yang dalam prakteknya merupakan tindakan bertutur dengan menggunakan bahasa yang jika *speech acts* berhasil maka akan mampu memberikan hubungan antara kata dan dunia yang disebutkan oleh Onuf sebagai *words make world*. Dengan demikian Bahasa menjadi bagian integral dari hubungan antar manusia. Meskipun *speech acts* merupakan pekerjaan yang sulit karena terkait erat dengan ide-ide dalam tujuan dan konteks yang sesuai. Selanjutnya tujuan *speech acts* untuk memberikan efek terhadap beberapa keadaan memiliki keterbatasan pada ranah bahasa. Konstruksi sosial tersebut dilakukan oleh aktor intelektual di Kabupaten Banyumas melalui transfer ide, gagasan dan pengetahuan terkait interaksi transnasional yang dianggap mampu memberikan manfaat. Konstruksi sosial dilakukan melalui berbagai hal yang dilakukan oleh aktor intelektual melalui berbagai aktivitas transnasional maupun menggunakan kemampuan bertuturnya melalui berbagai publikasi ilmiah, penyuluhan, pelatihan, pendampingan, inisiasi kerjasama, maupun proses interaksi antar aktor yang terjadi dalam jaringan. Melalui kemampuan bertutur dan aktivitasnya, para intelektual di Kabupaten Banyumas menyebarkan ide-ide dan gagasan transnasional serta menindaklanjutinya dengan berbagai kegiatan pendampingan serta publikasi. Berbagai kegiatan dilakukan aktor intelektual dengan sasaran berbagai objek yang berupa aktor lain ataupun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi yang dimiliki oleh aktor intelektual

Koneksi yang berkelanjutan dalam jaringan tersebut membentuk sebuah interaksi yang bernuansa kerjasama yang ditunjukkan dengan berbagai aktivitas perijinan yang diberikan oleh aktor birokrat kepada aktor intelektual untuk melakukan aktivitasnya yang mengacu pada penyebaran gagasan atau ide maupun aktivitas terkait penelitian, pendampingan dan inisiasi berbagai program terkait interaksi transnasional. Dengan adanya jaringan aktor tersebut maka para aktor akan lebih mudah dalam mencapai kepentingannya, serta dengan hubungan yang bernuansa kerjasama para aktor mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada harus melakukannya sendiri, setidaknya sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif.

Dalam jaringan aktor transnasional di Kabupaten Banyumas juga mengalami proses translasi dimana terjadi berbagai penyesuaian terhadap suatu keadaan atau sesuatu yang dikonstruksikan sehingga bisa mengalami adaptasi dan perubahan. Dalam sebuah jaringan terjadi proses translasi dalam bentuk konstruksi. Proses translasi ini merupakan proses alih bahasa yang dipakai menerjemahkan kode, bahasa dan budaya bagi aktor dalam sebuah jaringan. Dalam proses translasi ini lah terjadi berbagai pengenalan dan penyesuaian terhadap ide-ide atau gagasan tentang interaksi transnasional sehingga proses konstruksi yang berjalan dengan interaksi yang berulang baik melalui *deeds* maupun *speech act*. Jika proses translasi berjalan dengan baik maka adaptasi atau penyesuaian dengan nilai-nilai ataupun norma yang dikonstruksikan. Proses translasi dalam jaringan aktor transnasional di Kabupaten Banyumas merupakan interaksi antara aktor intelektual dalam menerjemahkan nilai-nilai dan menyampaikan hal-hal terkait upaya, urgensi maupun manfaat dari interaksi transnasional di berbagai bidang seperti di bidang ekonomi para aktor intelektual yang berasal dari akademisi menyampaikan perlunya berinteraksi dalam bentuk aktivitas ekspor produk ke negara lain, perlunya melakukan sertifikasi produk untuk bisa menembus pasar global.

Jika kita mengamati jaringan aktor transnasional di Kabupaten Banyumas, maka yang bertindak sebagai aktan atau aktor sebagai pengendali jaringan adalah aktor pemerintah atau birokrat. Aktor birokrat mengendalikan jaringan melalui berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun dengan menerapkan aturan pemerintah pusat untuk dapat melakukan pengendalian terhadap jaringan. Pengendalian juga dilakukan oleh pemerintah dengan cara penggunaan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga aktor-aktor lain tetap harus menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Aktor intelektual melakukan aktivitasnya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, demikian juga aktor intelektual

harus mendapatkan ijin dari pemerintah (baik daerah maupun pusat) sesuai kewenangan. Namun tidak hanya terkait ijin dan aturan saja, para aktor pun mendapatkan fasilitasi oleh aktor birokrat dalam berbagai bentuk sesuai aturan yang berlaku. Bahkan pemerintah pun memiliki kewenangan untuk melarang, tidak memberikan ijin atau memberikan sanksi terkait aktivitas yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ada. Pemerintah membuat program pembangunan yang dianggap penting dan perlu bagi masyarakat sehingga semua aktivitas aktor harus mengacu pada tercapainya target pembangunan tersebut dalam berbagai bidang. Baik aktor intelektual (akademisi) maupun para entrepreneur dalam menjalankan aktivitasnya harus terikat pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai intermediary atau aktor penghubung yang ada dalam jaringan tersebut adalah aktor akademis atau intelektual. Para intelektual yang menjadi penghubung dan membantu pemerintah menjalankan program pembangunan yang dalam bidang-bidang yang bisa dicapai melalui interaksi transnasional. Seperti halnya program peningkatan kesejahteraan bisa dicapai dengan cara meraih peluang di pasar global baik berupa ekspor maupun kesempatan kerja global, kesempatan menjalankan pendidikan dan aktivitas edukatif di luar negeri, memanfaatkan kerjasama internasional dan melakukan interaksi transnasional secara virtual. Aktor intelektual menjalankan fungsi intermediary sekaligus menjalankan tugas dan kepentingannya sebagai akademisi. Aktivitas sebagai intermediary dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran program pemerintah dan mendorong transnasionalisme sebagai upaya pencapaian target program-program pemerintah melalui aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kesimpulan

Interaksi transnasional merupakan bentuk proses dan fenomena yang berkembang melewati batas negara yang tidak terbatas pada interaksi aktor politik pemerintah tetapi melibatkan aktor non pemerintah dan juga interaksi yang tidak terbatas antara kelompok dalam masyarakat maupun antar individu yang melewati batas negara. Dengan interaksi transnasional terjadi proses intensifikasi entitas sosial tidak hanya terbatas pada negara namun juga terjadi pada kelompok atau komunitas, organisasi ataupun pasar transnasional. Secara sederhana interaksi transnasional dapat diidentifikasi sebagai suatu kegiatan yang melintasi batas negara, namun berbeda dengan tindakan diplomasi yang selalu berkaitan erat dengan peristiwa politik dan pengaruh, kegiatan

interaksi transnasional tidak selamanya berbicara mengenai hal yang serupa dengan diplomasi. Transnasionalisme di dalam prosesnya seringkali disebut dengan transnasionalisasi, proses ini merupakan suatu dampak dari perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hingga pada akhirnya mempengaruhi akan terciptanya organisasional masyarakat yang tidak lagi terbatas oleh negara di dalam interaksi yang dilakukan. Transnasionalisasi memungkinkan akan adanya proses interaksi individu yang tidak lagi terbatas pada lokasi spesifik dari suatu wilayah.

Interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas terjadi pada beberapa bidang antara lain bidang ekonomi, pembangunan pedesaan, budaya dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, interaksi transnasional meliputi aktivitas perdagangan dalam hal ini ekspor berbagai komoditas dengan berbagai dinamika interaksi transnasional mengingat adanya berbagai aturan tentang produk ekspor, termasuk sertifikasi produk yang harus diperoleh dari lembaga-lembaga sertifikasi internasional. Pada bidang pembangunan pedesaan, interaksi transnasional terjadi dengan memanfaatkan relasinya dengan sebuah yayasan di luar negeri yang aktif membantu pendanaan program pembangunan desa terutama untuk bidang sumber daya manusia serta berbagai sarana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang budaya, pelaku budaya secara aktif melakukan aktivitasnya secara lintas negara, memiliki komunitas yang beranggotakan para peminat dan pemerhati seni lintas negara. Sementara itu di bidang pendidikan, perguruan tinggi di Kabupaten Banyumas secara aktif membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan maupun non pendidikan di luar negeri serta melakukan aktivitas yang melibatkan mitra dan mendapat manfaat dari kerjasama internasional. Namun tidak hanya institusi pendidikannya yang aktif melakukan interaksi transnasional, secara individu para akademisi juga aktif melakukan interaksi transnasional dalam berbagai bentuk dan tergabung dalam berbagai komunitas keilmuan, studi lanjut, konferensi internasional, kolaborasi riset dan publikasi internasional.

Peran pemerintah dalam interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas adalah dalam hal regulasi, fasilitasi dan eksekusi. Pemerintah Kabupaten Banyumas membuat regulasi yang tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Banyumas. Regulasi ini juga terkait dengan prosedur dalam mengurus legalitas dan hal-hal yang berkaitan dengan layanan. Fasilitasi berupa layanan konsultasi maupun pendampingan, pelatihan serta pemberian bantuan alat serta memfasilitasi adanya asosiasi sehingga lebih mudah dalam melakukan koordinasi. Dalam perannya sebagai eksekutor,

pemerintah bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Peran akademisi selain sebagai pelaku interaksi transnasional juga berperan sebagai pihak yang melakukan proses konstruksi sosial melalui berbagai aktivitas Tri Darma Perguruan Tinggi. Proses konstruksi sosial tidak hanya dilakukan kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah, akademisi bisa menjembatani penyampaian program pemerintah yang berimplikasi pada aktivitas transnasional.

Dalam interaksi transnasional yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi relasi antara intelektual birokrat dan entrepreneur dimana intelektual merupakan pihak-pihak yang membawa atau menyebarkan ide atau gagasan tentang interaksi transnasional, sementara birokrat memberikan fasilitasi pada aktivitas transnasional yang berhubungan dengan kewenangannya sebagai birokrat. Sedangkan entrepreneur merupakan kalangan pegiat atau pelaku interaksi transnasional yang secara aktif menjalin interaksi transnasional secara berkelanjutan dalam bidang tertentu. Namun relasi yang dominan di ranah politik lokal terkait interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas adalah relasi intelektual birokrat yang bersifat jaringan (*beuracrat-intellectual network*) dimana kedua kelompok ini memiliki kepentingan dan peran dan sumber daya yang signifikan dan terkoneksi dalam sebuah jaringan dalam mendorong terjadinya interaksi transnasional di Kabupaten Banyumas. Dalam jaringan tersebut aktor pemerintah bertindak sebagai aktan, dan aktor intelektual berperan sebagai intermediary yang dalam jaringan aktor tersebut terjadi proses translasi dalam hal ini penyesuaian serta penerimaan terhadap ide atau gagasan yang dalam proses ini terjadi konstruksi berbagai nilai terutama terkait transnasionalisme.

Daftar Pustaka

- Latour, Bruno (2005), *Reassembling the Social; An Introduction to Actor Network Theory*, Oxford University Press
- Lee, Hellen and Steve Tupai Francis, (2009) *Migration and Transnationalism; Pacific Perspective*, Melbourne: ANU Press
- Nosa, Vili (2009), The Impact of Transnationalism on Niue dalam Helen Lee and Steve Tupai Francis (2009), *Migration and Transnationalism*, Melbourne: ANU University Press
- Nye, Joseph S & Robert O. Keohane, (1971), Transnational Relations and World Politics, *International Organization*, Vol. 25 No.3 (Summer), Wisconsin Press

- Pramuwarsari, Amelia (2021), Efisiensi Pemasaran Gula Kristal Organik di Kabupaten Banyumas, Studi Kasus Desa Semedo, Desa Petahunan dan Desa Karangkemiri, *Jurnal Pertanian Peradaban vol. 1, no. 1 tahun 2021*
- Pries, L. 2008. *Rethinking Transnationalism: The Meso-link of Organisations*. London: Routledge.
- Rosenau, J.N (1980), *The Study of Global Interdependence, Essays of Transnationalization of World Affairs*, London, Pinter
- Sandoval, Gerardo Francisco, (2013), Shadow Transnationalism: Cross-Border Networks and Planning Challenges of Transnational Unauthorized Immigrant Communities, *Journal of Planning Education and Research* 33(2) 176 –193
- Shin, J. C., & Kehm, B. M. (Eds.). (2012). Institutionalization of world-class universities in global competition (Vol. 6). Springer Science & Business Media
- Warwick, Donald P (1971), Transnational Participation, *International Organization*, Vol 25 No. 3 (Summer), Winconsin Press
- Welch A (2012) The limits of regionalism in Indonesia higher education. *Asian Education and Development Studies* 1(1): 24–42.
- Wijayanti, S & Zaysda, NA (et.al) . (2018). Perlindungan Buruh Migran Indonesia melalui Pelatihan Paralegal di Banyumas, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, ISSN: 2549-8347 (Online), ISSN: 2579-9126 (Print) Volume 2 No. 1 Maret 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRACT	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tinjauan Pustaka	7
C. Kerangka Konseptual	18
C.1. Transnasionalisme	18
C.2. Konstruktivisme	27
C.3. Teori Jaringan Aktor	33
D. Metodologi	36
D.1. Jenis Penelitian	36
D.2. Lokasi dan Subjek Penelitian	36
D.3. Teknik Pengumpulan Data	37
D.4. Analisa data	39
D.5. Sistematika Penulisan	40
BAB 2 KABUPATEN BANYUMAS DAN INTERAKSI TRANSNASIONAL DI BIDANG PEMBANGUNAN	42
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Banyumas	42
B. Interaksi Transnasional di Bidang Ekonomi	46
C. Interaksi Transnasionalisme dalam Pembangunan Pedesaan	63
D. Interaksi Transnasional di bidang budaya	68
E. Interaksi Transnasionalisme di bidang pendidikan	80

BAB 3 INTERAKSI TRANSNASIONAL: PENGALAMAN DARI KABUPATEN BANYUMAS	103
A. Peran Pemerintah dalam Aktivitas Transnasionalisme di Bidang Ekonomi	105
B. Peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan yang berkaitan dengan interaksi transnasional	118
C. Peran Pemerintah dalam interaksi transnasionalisme di bidang budaya	120
D. Peran Pemerintah dalam interaksi transnasionalisme di bidang pendidikan	122
BAB 4 ANALISIS RELASI AKTOR INTELEKTUAL DAN BIROKRAT DALAM INTERAKSI TRANSNASIONAL DI KABUPATEN BANYUMAS	127
A. Pola dan Tipologi Transnasional di Kabupaten Banyumas	127
B. Relasi Intelektual Birokrat dalam Interaksi Transnasional di Kabupaten Banyumas	137
B.1. Relasi intelektual birokrat pada transnasionalisme di bidang ekonomi	140
B.2. Relasi Intelektual Birokrat pada Interaksi Transnasional di Bidang Pembangunan Pedesaan	145
B.3. Relasi Intelektual Birokrat pada Interaksi Transnasional di Bidang Budaya	147
B.4. Relasi Intelektual Birokrat pada Interaksi Transnasional di Bidang Pendidikan	149
C. <i>Bureaucrat-Intellectual Network</i> dalam Interaksi Transnasional di Kabupaten Banyumas	152
BAB 5 KESIMPULAN	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN	172